

Pembiayaan Pendidikan Berbasis Kinerja dan Penguatan Pendidikan Masyarakat (Studi Implementasi BOS Kinerja pada Sekolah Menengah Atas di Papua)

Nur Ningsih¹, Syafriadi², Musdalifa.T³, Rohmatun Khasanah⁴, Rahibun Abdullah⁵

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

2407010098@students.unis.ac.id¹, 2407010050@students.unis.ac.id²,
2407010145@students.unis.ac.id³, 2407010028@students.unis.ac.id⁴,
2407010048@students.unis.ac.id⁵

Submitted: 27th July 2025 | **Edited:** 25th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Ningsih, N., Syafriadi, S., Musdalifa, T., Khasanah, R., & Abdullah, R. (2025). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Kinerja dan Penguatan Pendidikan Masyarakat (Studi Implementasi BOS Kinerja pada Sekolah Menengah Atas di Papua). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1505-1513.

ABSTRACT

Educational inequality in Indonesia's frontier, outermost, and disadvantaged (3T) regions remains a major challenge, particularly in Papua where education development indicators lag behind the national average. To address this issue, the government introduced the Performance-Based School Operational Assistance (BOS Kinerja) program as an incentive for schools to improve quality through better management and academic outcomes. This study aims to evaluate the implementation of BOS Kinerja in senior high schools (SMA) in Papua and to identify its impacts, challenges, and opportunities for improvement. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews with principals, teachers, and school committees, complemented by observations and document analysis in four recipient schools located in Jayapura and Mimika Regencies. The findings indicate that BOS Kinerja supports teacher professional development, instructional innovation, and student engagement, particularly in schools with strong leadership and participatory governance. Nevertheless, significant obstacles remain, including limited human resources, delayed fund disbursement, geographical constraints, and performance indicators that are not fully context-sensitive. Strengthening digital financial management, enhancing school leadership capacity, and fostering community participation and cross-sector partnerships are identified as key strategies for ensuring more effective and sustainable implementation of BOS Kinerja in Papua.

Keywords: BOS Kinerja, Education Funding, Papua, School Leadership, Community Participation, Education Quality

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa di era global. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program strategis

dan kebijakan pendanaan. Namun, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Papua. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2023) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Pendidikan Papua masih berada di bawah rata-rata nasional, menegaskan adanya kesenjangan yang serius dalam penyediaan layanan pendidikan, terutama di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkenalkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja pada tahun 2019. Berbeda dengan BOS Reguler, BOS Kinerja didasarkan pada pencapaian indikator kinerja akademik dan manajerial sekolah, dengan tujuan mendorong inovasi dan peningkatan mutu pembelajaran (Pratomo et al., 2022). Pendanaan berbasis kinerja ini diharapkan menjadi insentif bagi sekolah untuk terus meningkatkan tata kelola dan kualitas pendidikan.

Meskipun demikian, implementasi BOS Kinerja di daerah 3T menghadapi berbagai hambatan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Putra dan Lestari (2022) serta Supriyanto et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, studi Ningsih dan Wibowo (2021) serta Hermawan et al. (2023) menemukan bahwa keterlambatan pencairan dana, lemahnya kapasitas manajerial, serta indikator kinerja yang kurang relevan dengan konteks lokal menjadi kendala serius. Hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur pendidikan juga menambah kompleksitas implementasi program di Papua (Mulyadi & Kurniawan, 2023).

Literatur yang ada umumnya meninjau BOS Kinerja dari perspektif nasional atau di daerah perkotaan, sementara kajian yang secara khusus menyoroti konteks Papua masih terbatas. Dengan demikian, terdapat gap penelitian terkait bagaimana sekolah di wilayah tertinggal mengelola dan memanfaatkan dana BOS Kinerja untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi implementasi BOS Kinerja pada SMA di Papua.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana BOS Kinerja, menilai dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan,

mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan peluang perbaikan kebijakan yang lebih adaptif. Melalui pendekatan evaluasi kontekstual, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam pengembangan kebijakan pendidikan berbasis kinerja, maupun secara praktis sebagai masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah 3T.

LANDASAN TEORI

Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas individu sekaligus kesejahteraan masyarakat. Psacharopoulos dan Patrinos (2020) menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan menghasilkan manfaat ekonomi maupun sosial, sehingga kebijakan pendidikan harus dirancang untuk menciptakan dampak ganda: peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus pembangunan masyarakat.

Dalam konteks BOS Kinerja, pandangan ini dipertegas melalui mekanisme pendanaan berbasis hasil yang bertujuan memberikan insentif bagi sekolah untuk berinovasi dalam tata kelola dan pembelajaran (Pratomo et al., 2022). Namun, efektivitas kebijakan pendidikan berbasis kinerja tidak hanya ditentukan oleh mekanisme alokasi dana, melainkan juga oleh faktor internal seperti kualitas kepemimpinan sekolah, serta faktor eksternal seperti dukungan masyarakat dan pemerintah daerah (Supriyanto et al., 2023).

Konsep evaluasi kontekstual dari Patton (2021) menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan geografis lokal dalam menilai keberhasilan sebuah program. Hal ini sangat relevan untuk wilayah 3T seperti Papua, di mana kesenjangan infrastruktur, kondisi sosial ekonomi, dan akses teknologi menuntut kebijakan yang lebih fleksibel (Rahardjo et al., 2024). Evaluasi program di daerah tertinggal tidak dapat disamakan dengan wilayah perkotaan yang lebih mapan, sehingga indikator kinerja perlu disesuaikan dengan realitas setempat (Pratama & Laili, 2022).

Selain evaluasi kontekstual, teori good governance juga penting dalam memahami implementasi BOS Kinerja. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan landasan dalam tata kelola pendidikan yang efektif (Transparency International, 2021). Sekolah yang melibatkan masyarakat, komite, dan tokoh adat

dalam perencanaan serta pengawasan keuangan cenderung menunjukkan hasil yang lebih optimal karena tumbuh rasa kepemilikan bersama (Rumawas & Suryawan, 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan juga selaras dengan teori partisipasi bertingkat, di mana semakin tinggi pelibatan komunitas, semakin besar pula legitimasi dan efektivitas kebijakan pendidikan (Arnstein, 2019). UNESCO (2023) menegaskan bahwa keterlibatan komunitas merupakan elemen penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, khususnya di wilayah dengan keragaman budaya seperti Papua.

Dengan demikian, BOS Kinerja sebagai instrumen pendanaan berbasis hasil dapat dipahami dari tiga perspektif utama: pendidikan sebagai investasi jangka Panjang, pentingnya evaluasi program berbasis konteks lokal dan penerapan prinsip good governance dan partisipasi masyarakat. Ketiga perspektif ini menjadi kerangka teoretis dalam menilai efektivitas BOS Kinerja di Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi program BOS Kinerja pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Papua. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan kebijakan pendidikan dalam konteks tertentu, serta memungkinkan peneliti menggali dinamika implementasi program secara holistik (Creswell & Poth, 2019). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada empat SMA penerima BOS Kinerja tahun anggaran 2023 yang berada di Kabupaten Jayapura dan Mimika. Pemilihan kedua wilayah ini didasarkan pada pertimbangan representasi karakteristik wilayah, yaitu Jayapura sebagai daerah perkotaan dengan akses pendidikan relatif lebih baik, dan Mimika yang mewakili wilayah pedalaman dengan keterbatasan infrastruktur. Pertimbangan ini bertujuan untuk membandingkan variasi konteks implementasi BOS Kinerja di wilayah 3T Papua (Miles et al., 2020).

Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara, guru, pengawas sekolah, serta perwakilan komite sekolah. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS Kinerja (Etikan, 2020). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,

observasi lapangan, dan analisis dokumen, termasuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta laporan penggunaan dana BOS.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member checking untuk memastikan keabsahan informasi (Nowell et al., 2019). Pendekatan evaluasi kontekstual sebagaimana dikembangkan oleh Patton (2021) digunakan sebagai kerangka penilaian efektivitas program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan implementasi BOS Kinerja, tetapi juga menilai sejauh mana program tersebut relevan dan efektif dalam konteks sosial, geografis, dan budaya di Papua.

HASIL PENELITIAN

Strategi Pengelolaan Dana BOS Kinerja

Pengelolaan dana BOS Kinerja di SMA di Papua menunjukkan variasi strategi yang dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan kondisi geografis. Sekolah di wilayah perkotaan, seperti SMA Negeri 1 Sentani, mampu menyusun perencanaan strategis yang memprioritaskan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan TIK, penyediaan bahan ajar digital, serta penguatan literasi dan numerasi siswa. Sebaliknya, sekolah di wilayah pedalaman Mimika lebih banyak memanfaatkan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perbaikan ruang kelas, pengadaan buku, dan sarana pembelajaran sederhana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Supriyanto et al. (2023) yang menegaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi guru serta komite sekolah berpengaruh langsung pada efektivitas pengelolaan BOS Kinerja. Hasil ini juga menguatkan studi Wirawan dan Hartati (2022) yang menekankan pentingnya kapasitas manajerial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan berbasis kinerja di sekolah.

Dampak terhadap Mutu Pendidikan

Implementasi BOS Kinerja terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Di Jayapura, program ini mendorong penggunaan teknologi pembelajaran, meningkatnya partisipasi siswa, serta motivasi guru dalam mengembangkan metode pembelajaran inovatif. Sementara itu, sekolah di Mimika

menunjukkan peningkatan pada ketersediaan sarana dasar belajar dan partisipasi siswa meskipun keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hanushek et al. (2021) yang menunjukkan bahwa insentif berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran jika diikuti dengan pengembangan kapasitas guru. Putra dan Lestari (2022) juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh besarnya dana, tetapi oleh tata kelola yang baik dan keterlibatan seluruh warga sekolah.

Hambatan Implementasi

Beberapa hambatan signifikan teridentifikasi dalam pelaksanaan BOS Kinerja. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam penyusunan RKAS berbasis kinerja dan pemahaman teknis petunjuk pelaksanaan. Kedua, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, yang berdampak pada terhambatnya program peningkatan mutu. Ketiga, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau, terutama di wilayah pegunungan, mengakibatkan distribusi sarana pendidikan sering terhambat. Selain itu, indikator kinerja yang digunakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal. Hambatan ini sejalan dengan penelitian Hermawan et al. (2023) yang menyoroti dampak keterlambatan dana terhadap efektivitas program sekolah, serta studi Yuliani dan Mulyadi (2020) yang menunjukkan pengaruh faktor transportasi dan aksesibilitas terhadap implementasi pendidikan di wilayah terpencil.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat, termasuk komite sekolah dan tokoh adat, terbukti memperkuat akuntabilitas dan relevansi program. Di Jayapura, keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan dan evaluasi anggaran membantu mengarahkan program sesuai kebutuhan lokal. Sementara itu, di Mimika, tokoh adat berperan sebagai mediator untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pendidikan formal. Kondisi ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi tata kelola (Transparency International, 2021). Hasil ini juga mendukung penelitian Rumawas dan Suryawan (2022) serta UNESCO (2023) yang menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan efektivitas pendidikan di daerah dengan keragaman budaya.

Perbandingan antar Sekolah

Perbandingan implementasi BOS Kinerja menunjukkan perbedaan signifikan antar sekolah. SMA di Jayapura dengan kepemimpinan yang kuat dan budaya organisasi yang kolaboratif mampu mengoptimalkan penggunaan dana secara strategis. Sebaliknya, sekolah di Mimika yang menghadapi keterbatasan manajerial dan dukungan pemerintah daerah lebih berfokus pada kebutuhan mendasar. Hal ini mendukung temuan Sari dan Nugroho (2022) bahwa kepemimpinan kepala sekolah sebagai agen perubahan sangat menentukan keberhasilan kebijakan berbasis kinerja. Perbedaan konteks geografis dan kapasitas daerah semakin memperjelas perlunya fleksibilitas kebijakan pendidikan sebagaimana ditegaskan Rahardjo et al. (2024).

Peluang Perbaikan

Meskipun terdapat berbagai kendala, peluang strategis untuk perbaikan implementasi BOS Kinerja terbuka luas. Digitalisasi pengelolaan dana melalui sistem daring dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dilaporkan oleh Kemendikbudristek (2023). Selain itu, penguatan kapasitas kepala sekolah melalui pelatihan manajemen keuangan juga menjadi peluang penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran (Wirawan & Hartati, 2022). Kemitraan lintas sektor dengan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat juga dipandang sebagai strategi yang potensial untuk mendukung keberlanjutan program, sejalan dengan rekomendasi UNESCO (2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program BOS Kinerja memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMA di Papua, terutama dalam mendorong inovasi pembelajaran, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan motivasi guru. Sekolah dengan kepemimpinan yang kuat, manajemen yang transparan, serta budaya organisasi yang kolaboratif mampu memanfaatkan dana secara lebih strategis untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk komite sekolah dan tokoh adat, terbukti memperkuat akuntabilitas dan relevansi program dalam konteks lokal.

Namun demikian, efektivitas BOS Kinerja di Papua masih dipengaruhi oleh sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kendala geografis,

keterlambatan pencairan dana, serta indikator kinerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil sekolah di wilayah 3T. Hambatan-hambatan tersebut menegaskan pentingnya adaptasi kebijakan agar lebih kontekstual dan responsif terhadap karakteristik sosial, budaya, serta geografis daerah.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi pendekatan evaluasi kontekstual (Patton, 2021) dalam menilai efektivitas program berbasis kinerja, serta menegaskan pentingnya prinsip good governance dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan di wilayah tertinggal. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, diantaranya : digitalisasi pengelolaan dana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penguatan kapasitas kepala sekolah melalui pelatihan manajemen keuangan dan kepemimpinan, penyesuaian indikator kinerja agar lebih sesuai dengan konteks lokal, serta pengembangan kemitraan lintas sektor dengan LSM, dunia usaha, dan komunitas lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, BOS Kinerja berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam memperkuat sistem pendidikan di daerah 3T, khususnya Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation in education governance. *Journal of Educational Administration*, 57(4), 367–383.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Etikan, I. (2020). Sampling and sampling methods in qualitative research. *International Journal of Academic Research in Education*, 6(1), 47–56.
- Hanushek, E. A., Piopiunik, M., & Wiederhold, S. (2021). The value of smarter teachers: International evidence on teacher cognitive skills and student performance. *Journal of Human Resources*, 56(1), 123–146.
- Hermawan, D., Sutisna, R., & Aulia, N. (2023). Keterlambatan dana BOS dan dampaknya terhadap program sekolah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 19(1), 45–58.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan tahunan BOS: Inovasi digital dalam pengelolaan dana pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mulyadi, H., & Kurniawan, R. (2023). Peran pemerintah daerah dalam penguatan manajemen sekolah di wilayah 3T. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Pendidikan*, 9(1), 33–47.

- Ningsih, R., & Wibowo, S. (2021). Tantangan manajerial dalam pengelolaan dana BOS di sekolah 3T. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 11(2), 88–97.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 18(1), 1–13.
- Patton, M. Q. (2021). *Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use* (2nd ed.). Guilford Press.
- Pratama, H., & Laili, N. (2022). Efektivitas indikator BOS Kinerja dalam konteks sekolah terpencil. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 33–44.
- Pratomo, A., Iskandar, R., & Fauziah, N. (2022). Implementasi BOS Kinerja dan pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 9(2), 102–116.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2020). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 28(3), 233–244.
- Putra, A. Y., & Lestari, S. D. (2022). Manajemen dana BOS Kinerja dan implikasinya terhadap mutu pendidikan di sekolah pinggiran. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(3), 211–225.
- Rahardjo, S., Prasetya, B., & Lailani, N. (2024). Desentralisasi pendidikan dan konteks lokal: Studi perbandingan antar wilayah di Indonesia. *Indonesian Journal of Education Policy*, 12(1), 65–78.
- Rumawas, H., & Suryawan, I. (2022). Pendidikan kontekstual berbasis budaya lokal Papua. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(3), 211–225.
- Sari, F. A., & Nugroho, A. D. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam mendorong efektivitas dana BOS Kinerja. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 145–157.
- Supriyanto, A., Sari, D. P., & Nugroho, H. (2023). Kepemimpinan kepala sekolah dan pengaruhnya terhadap efektivitas dana BOS Kinerja. *Indonesian Journal of Educational Policy*, 18(1), 55–68.
- Transparency International. (2021). *Strengthening accountability through citizen participation in public spending*. Transparency International.
- UNESCO. (2023). *Community engagement in education: Global Education Monitoring Report 2023*. UNESCO Publishing.
- Wirawan, I. G. P., & Hartati, T. (2022). Penguatan kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 78–90.
- Yuliani, R., & Mulyadi, T. (2020). Transportasi dan aksesibilitas dalam pendidikan wilayah terpencil. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 6(3), 122–135.